

ILMU-ILMU SOSIAL DAN TEOLOGI KONTEKSTUAL

SOCIAL SCIENCES AND CONTEXTUAL THEOLOGY

Ignas Kleden

Center for East Indonesian Affairs (CEIA) Jakarta

Abstract

This text describes the connection between the social sciences and contextual theology. The social sciences investigate the way people relate in society via various institutions and structures, which facilitate relationships in the economic, cultural and political spheres. The social sciences also investigate the way human beings relate to nature for two reasons, namely to defend themselves against the power of nature, and also to enable them to benefit from nature. Systematic theology studies the relationship between God and humanity in light of revelation and faith. Contextual theology investigates to what extent human institutions and structures, interpersonal relationships and the relationship between humanity and nature, become a help or a hindrance to expressing faith in the Lord, and to listening to what is said by God in God's revelation to humankind.

Keywords: Social Sciences, Contextual Theology, Society, People, Institution, Humanity, Relationship, Lord, Structures.

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara ilmu-ilmu sosial dan teologi kontekstual. Ilmu-ilmu sosial menyelidiki hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat melalui berbagai institusi dan struktur yang memungkinkan dan memudahkan hubungan itu dalam ekonomi, kebudayaan, dan

politik. Ilmu-ilmu sosial juga meneliti hubungan manusia dengan alam dalam kaitannya dengan dua tujuan, yaitu mempertahankan diri terhadap kekuatan alam, dan memanfaatkan alam untuk keperluan hidupnya. Di sini teknologi dan ekonomi memainkan peranan yang menentukan. Teologi sistematik meneliti berbagai aspek relasi Tuhan dengan manusia melalui wahyu serta relasi manusia dengan Tuhan melalui iman. Teologi kontekstual meneliti sejauh mana institusi dan struktur yang dibangun manusia, baik dalam relasi antar-manusia maupun dalam relasi manusia dan alam, menjadi fasilitas atau hambatan baginya dalam menyatakan iman kepada Tuhan, dan dalam mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan dalam wahyu-Nya kepada manusia.

Kata kunci: Ilmu Sosial, Teologi Kontekstual, Masyarakat, Manusia, Institusi, Kemanusiaan, Hubungan, Tuhan, Struktur

PENDAHULUAN

Dalam pengertian sekarang, apa yang dinamakan ilmu-ilmu sosial adalah bidang ilmu pengetahuan empiris yang meneliti dan menguraikan masyarakat manusia sebagai gejala empiris, yang temuan-temuannya dapat diamati dan kesahihannya dapat diuji dengan metode-metode empiris. Dengan demikian ilmu-ilmu sosial bukanlah bidang ilmu spekulatif seperti filsafat dan teologi, yang bekerja berdasarkan pemikiran rasional semata, yang dapat diuji dengan logika dan dialektika atau dengan metode-metode lain yang menggarap pemikiran rasional seperti fenomenologi, intuisiisme, dan banyak metode lain yang dikembangkan dalam filsafat tentang pengetahuan manusia.

Pertanyaan mengenai mengapa ilmu pengetahuan harus bersifat rasional dan empiris pernah diajukan dan dijawab oleh filsuf Jerman, Immanuel Kant. Menurut filsuf ini, sifat empiris dari pengetahuan harus ada dalam ilmu pengetahuan, agar pengetahuan itu terhindar dari antinomi berupa dua pernyataan yang kontradiktoris satu terhadap yang lain, tetapi sama-sama logis, dan tidak bisa diputuskan mana yang salah dan mana yang benar, apabila hanya didasarkan pada unsur rasional dan tidak ada unsur empiris dalam pengetahuan itu.¹ Kesulitan ini

1 Immanuel Kant, *Kritik der reinen Vernunft* (Koeln, Koeneemann Verlagsgesellschaft, 1995), hlm. 358-365.

dinamakannya *Antinomie der reinen Vernunft* yaitu antinomi dalam akal murni. Kita bisa memberi contoh yang sederhana untuk antinomi ini. Seorang pemuda mengatakan kepada pacarnya, sebaiknya mereka pergi nonton ke bioskop pada hari hujan, karena pastilah banyak orang malas keluar rumah, sehingga mereka akan mudah mendapat tiket tanpa harus antri terlalu lama. Kebetulan pacarnya adalah cewek yang terlatih baik dalam logika, dan berkata kepada pemuda itu, jangan-jangan pada hari hujan lebih banyak orang yang datang ke bioskop, karena orang yang berpikir seperti cowok pacarnya itu, mungkin ada tiga atau empat ribu orang. Antrian akan panjang sekali di tengah hujan, dan orang akan masuk gedung bioskop dalam keadaan basah kuyup.

Dua pernyataan itu sama-sama logis meskipun bertentangan secara kontradiktoris, tetapi tak dapat diputuskan mana yang salah atau benar, hanya dengan berdebat di kampus, atau di rumah. Jalan satu-satunya adalah coba mendatangi dua tiga bioskop pada hari hujan, untuk melihat apakah lebih banyak orang yang antri membeli karcis, atau hanya beberapa belas orang. Artinya untuk memutuskan benar salahnya dua pernyataan yang bertentangan secara kontradiktoris, diperlukan unsur empiris dalam pengetahuan, dan tidak cukup hanya unsur rasional saja. Dengan penjelasan itu Kant memberi pendasaran yang amat kuat untuk sifat empiris dalam ilmu-ilmu alam yang dikaguminya. Sifat empiris yang ditekankan Kant untuk ilmu-ilmu alam kemudian diberlakukan untuk segala jenis ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial.

ILMU-ILMU SOSIAL SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN EMPIRIS

Sebagai ilmu empiris, ilmu-ilmu sosial tidak berusaha menjawab pertanyaan seperti mengapa ada masyarakat dan apa tujuan masyarakat, karena ini merupakan pertanyaan-pertanyaan filsafat sosial atau teologi sosial seperti dirumuskan dalam ajaran-ajaran sosial Gereja Katolik, tetapi langsung menyelidiki kenyataan-kenyataan yang dapat diamati dalam suatu masyarakat atau suatu komunitas. Kenyataan-kenyataan empiris itu dapat berupa: *Pertama*, lingkungan fisik suatu komunitas, apakah letaknya di dataran tinggi atau dataran rendah, apakah di daerah pantai atau di pegunungan, apakah di tanah dengan banyak hutan atau

di daerah yang hanya ada padang rumput. *Kedua*, struktur sosial yang ada dalam masyarakat, baik berupa stratifikasi sosial berdasarkan status sosial karena keturunan atau tingkat konsumsi, atau pun berupa kelas sosial berdasarkan kenyataan apakah suatu golongan dalam masyarakat menguasai alat-alat produksi berupa modal, tanah dan teknologi, atau hanya mempunyai tenaga kerja yang dijual dalam pasar tenaga kerja. *Ketiga*, penelitian empiris dapat juga memberi perhatian kepada sistem ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat; apakah ekonominya didasarkan pada penghasilan dari pertanian, dari jasa atau dari industri atau perdagangan. Apakah distribusi produksi pertanian dan harga produk pertanian diatur secara bebas dalam pasar, atau oleh monopoli satu orang, atau oligopoli beberapa orang, atau oleh regulasi pemerintah? *Keempat*, bidang penelitian lain ialah kependudukan atau sistem demografis, berupa besarnya jumlah penduduk, harapan hidup, tingkat kematian bayi, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan, tingkat pendidikan penduduk dan tingkat literasi atau melek-huruf, dan lapangan kerja yang tersedia untuk penduduk, dan penghasilan rata-rata yang ada di kalangan penduduk. *Kelima*, penelitian terhadap sistem politik yang ada dalam suatu masyarakat dan otoritas yang memegang kekuasaan dalam sistem politik itu. Dalam hal ini jenis-jenis konflik apa saja yang ada dalam politik; apakah konflik etnis, konflik agama, konflik ekonomi, atau konflik regional antardaerah? Apakah konflik dapat diselesaikan dengan jalan demokratis melalui perundingan dan negosiasi atau melalui konflik fisik dan kekerasan? *Keenam*, kebudayaan juga merupakan suatu bidang yang dapat dan sudah diteliti dalam berbagai penelitian empiris secara luas. Hal yang diteliti ialah sistem kepercayaan suatu kelompok budaya menurut agama asli mereka. Dalam hal ini diselidiki dalam wujud apa mereka mencitrakan Wujud Tertinggi penguasa semesta alam; dengan cara dan sarana apa mereka menyatakan sembah bakti kepada Wujud Tertinggi itu dan bagaimana mereka menyebut Wujud Tertinggi sebagai Yang Kudus. Adakah mitos-mitos yang menceritakan Wujud Tertinggi itu dan hubungannya dengan manusia, entah dalam bentuk cerita tentang kejadian alam semesta atau kosmogoni dan tentang penciptaan manusia pertama. Dalam hubungan dengan Wujud Tertinggi itu ditinjau

bagaimana suatu kelompok budaya mengatur otoritas di antara mereka sendiri: siapa yang dianggap sebagai pemegang otoritas terpenting dalam kelompok, bagaimana otoritas itu dibagi dan didelegasikan kepada tuan tanah, ketua adat, penjaga tanah dan hutan dan air serta siapa yang memutuskan kalau ada konflik di antara anggota kelompok? Penelitian antropologi budaya memberi perhatian besar kepada sistem kekerabatan dan sistem perkawinan serta pengaturan dan pewarisan hak milik. Diteliti juga larangan-larangan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena pelanggarannya akan mendatangkan musibah ke seluruh anggota komunitas. Secara singkat, nilai-nilai apa yang diatur dalam norma-norma yang menjadi pegangan anggota suatu kelompok budaya?²

Tuntutan bahwa ilmu-ilmu sosial bertugas melukiskan dan menguraikan realitas sosial seperti apa adanya, mempunyai konsekuensi bahwa ilmu-ilmu sosial tidak diperbolehkan terpengaruh atau terbawa oleh pertimbangan nilai dalam melakukan penelitian. Seseorang mungkin amat bersimpati dengan kelompok miskin dengan pendapatan di bawah UMR, tetapi dalam penelitian tentang kelompok miskin dia harus menahan dan mengontrol simpatinya terhadap kelompok ini, sehingga perasaan simpatinya tidak membuatnya melukiskan kelompok miskin secara berlebih-lebihan, lebih dari kenyataan kemiskinan yang ada. Penyelewengan karena simpati dapat terjadi kalau kelompok miskin dilukiskan sebagai golongan yang selalu tahan menderita, suka berbagi dan tolong-menolong serta selalu bersikap jujur. Sementara itu dalam kenyataan dengan mudah ditemukan bahwa ada juga anggota kelompok miskin yang suka memeras, mencuri dan merampok. Sebaliknya, peneliti lain mempunyai antipati yang besar terhadap kelompok kaya di kota-kota besar khususnya golongan kaya baru (*the new rich*). Dalam melaksanakan penelitiannya dia harus mengontrol rasa antipatinya, karena kalau tidak dia akan cenderung melihat para orang kaya sebagai orang yang licik, oportunistis dan bahkan korup, sementara dalam kenyataan ada juga orang

2 Patut disebut di sini jasa seorang misionaris SVD, yaitu Pater P. Arndt, yang telah meneliti agama asli pada beberapa suku di Flores, yaitu di Ngada, di Adonara dan Solor di Flores Timur, dan di daerah Sika, Maumere. Buku-buku Pater Arndt yang aslinya ditulis dalam bahasa Jerman, telah diterjemahkan dengan berhasil oleh Pusat Penelitian Candraditya, Maumere.

yang menjadi kaya karena bekerja keras dengan perhitungan ekonomi yang matang dan dapat memimpin bisnisnya dengan manajemen yang ketat.

Kewajiban seorang peneliti untuk mengekang dirinya dari kecenderungan membuat penilaian dalam meneliti suatu realitas sosial dinamakan sebagai kewajiban peneliti untuk berlaku *bebas-nilai*, atau *value-free* dalam bahasa Inggris atau *wertfrei* dalam bahasa Jerman.³ Tujuannya ialah menjaga agar penglihatan terhadap suatu objek penelitian dilakukan sedekat mungkin dengan keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diteliti, dan tidak dikacaukan oleh penilaian suka atau tidak suka, simpati atau antipati terhadap objek yang diteliti. Secara teknis dikatakan, sikap bebas-nilai dalam penelitian akan memungkinkan penglihatan yang objektif terhadap objek yang diteliti, dan tidak tercampur dengan penilaian yang bersifat subjektif.

Namun, perlu segera diingatkan, kewajiban untuk bersikap bebas-nilai dalam penelitian, tidak berarti bahwa seorang peneliti tidak diperbolehkan menganut nilai apa pun entah yang bersifat budaya, estetis, moral, keagamaan, maupun politis. Orang tidak bisa menghindari adanya nilai-nilai tertentu pada diri peneliti mana pun. Hal yang diminta hanyalah bahwa dalam melakukan tugas operasional penelitian, nilai-nilai ini harus dikontrol dan dikekang atau direduksi secara fenomenologis, agar memungkinkan persepsi yang seobjektif mungkin, mendekati keadaan sesungguhnya dari objek yang diteliti. Penelitian ilmu sosial tidak boleh dipengaruhi oleh *value judgment* karena penelitian ilmu sosial terbatas pada *reality judgment*.

Ini semua didasarkan pada sifat penelitian ilmu sosial yang bertugas menerjemahkan pertanyaan praktis menjadi pertanyaan teoretis. Pertanyaan praktis adalah pertanyaan mengenai *apa yang harus dilakukan*, sedangkan pertanyaan teoretis adalah *pertanyaan tentang apa yang dapat*

3 Max Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, dalam bab X dia membahas "der Sinn der 'Wertfreiheit' der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften" (makna bebas nilai dalam ilmu-ilmu sosiologi dan ekonomi), Tuebingen J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1968, hlm. 489-540.

*diketahui.*⁴ Dengan demikian seorang peneliti tidak dapat diminta membantu secara langsung usaha meningkatkan peran perempuan NTT dalam politik. Ini bukan tugas peneliti melainkan tugas politisi dan tugas para aktivis, yang bisa mengadakan seminar tentang peran perempuan dalam politik, atau membuat petisi untuk memperjuangkan partisipasi perempuan dalam politik, atau mengadakan kampanye besar-besaran tentang kesempatan yang harus diberikan kepada perempuan dalam politik. Semua ini adalah kegiatan praktis yang berhubungan dengan persoalan apa yang harus dilakukan.

Dalam hubungan itu peneliti dapat membantu proyek itu, tetapi dia harus mengubah persoalan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik menjadi pertanyaan teoretis. Kita ingat bahwa pertanyaan praktis adalah pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan, sedangkan pertanyaan teoretis adalah pertanyaan mengenai apa yang dapat diketahui. Dengan demikian kalau peneliti bersangkutan hendak membantu, dia perlu menyusun pertanyaan tentang apa yang dapat diketahui tentang kondisi perempuan NTT saat ini. Dia akan meneliti tingkat pendidikan perempuan NTT, tingkat pendapatan rata-rata perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam jenis pekerjaan yang sama. Apakah ada kemungkinan perempuan melibatkan diri dalam sektor publik ataukah mereka hanya dibatasi dalam peranan domestik mengurus rumah, suami dan anak-anak saja? Apa pandangan masyarakat setempat tentang perempuan yang terlibat dalam sektor publik dan berbicara di muka umum? Apakah masyarakat mendukung atau menolak? Sejauh mana suami bersedia mengambil-alih sebagian peran isteri dalam sektor domestik? Apakah ada persaingan dalam rumah tangga tentang tingkat pendapatan? Apakah suami tidak berkeberatan kalau pendapatan isteri lebih besar dari keterlibatannya dalam sektor publik?

Hasil penelitian seperti ini dapat menunjukkan kondisi kaum perempuan di NTT, berupa kondisi yang sudah memungkinkan atau

4 Kita ingat tiga pertanyaan filsuf Immanuel Kant yang diajukan oleh filsafatnya. Pertanyaan 1: *was kann ich wissen* (apa yang dapat saya ketahui), yang diajukan oleh akal murni (*reine Vernunft*). Pertanyaan 2 *was soll ich tun* (apa yang harus saya lakukan), yang diajukan oleh akal praktis (*praktische Vernunft*). Pertanyaan 3 *was darf ich hoffen* (apa yang boleh saya harapkan), diajukan oleh kehidupan dan pemikiran dalam agama dan moral.

belum memungkinkan mereka berpartisipasi secara lebih luas dalam politik, dalam parlemen atau dalam partai politik. Pengetahuan mengenai kondisi ini dapat menjadi pertimbangan bagi para aktivis dan para politisi dalam mendorong partisipasi perempuan yang lebih luas dalam politik.

Sekalipun demikian, selalu terdapat persoalan nilai dalam praktik penelitian, dan ini terlihat dari sekurang-kurangnya dua kenyataan. *Pertama*, tiap peneliti selalu mempunyai asumsi nilai atau *value assumption*. Asumsi nilai akan terlihat dalam pilihan masalah penelitian, yang menyebabkan seorang peneliti memilih meneliti perilaku ekonomi golongan termiskin di sebuah kabupaten miskin di NTT, sedangkan peneliti lain memilih meneliti penggunaan waktu senggang dua puluh artis yang paling kaya di Jakarta, atau pola konsumsi 10 pengacara yang paling mahal di Jakarta. Asumsi nilai akan membuat seorang peneliti memberi prioritas kepentingan kepada sebuah masalah yang hendak ditelitinya dibanding masalah lain. *Kedua*, peneliti tidak berdaya dan tidak berhak dalam mengendalikan implikasi nilai atau *value implication* dari hasil penelitiannya, yaitu bagaimana hasil penelitiannya digunakan untuk berbagai kepentingan yang lain. Kalau hasil penelitian tentang kelompok paling miskin di sebuah kabupaten di NTT, kemudian dipakai sebagai bahan kampanye dan propaganda dalam merebut posisi bupati atau gubernur di NTT, maka peneliti bersangkutan tidak dapat berbuat apa-apa untuk menentangnya. Demikian pun kalau hasil penelitian tentang gaya hidup para artis Jakarta, kemudian dijadikan bahan dan alasan segolongan aktivis untuk menentang niat para artis menjadi calon legislatif, maka peneliti bersangkutan tidak dapat mengendalikan penggunaan hasil penelitiannya untuk tujuan tersebut.

Dengan demikian persoalan bebas-nilai dalam penelitian hanya salah satu masalah nilai yang menjadi kewajiban peneliti untuk menaatinya dalam penelitian. Sementara itu asumsi nilai peneliti tidak bisa dicegah, dan baru terlihat dalam preferensi peneliti untuk menentukan masalah yang akan ditelitinya. Selanjutnya, implikasi nilai adalah penggunaan hasil penelitian untuk berbagai kepentingan di luar penelitian seperti kepentingan pendidikan, kepentingan agama atau kepentingan politik,

yang sudah berada di luar wewenang peneliti dan tidak dapat diintervensi olehnya.

Dalam hubungan dengan nilai, ada soal lain ialah apakah hasil-hasil penelitian ilmu sosial dapat menghasilkan suatu pedoman yang bersifat normatif. Patut diingat lagi bahwa hasil penelitian ilmu sosial hanya menunjukkan keadaan yang ada dan dapat diketahui, dan bukan sesuatu yang harus diadakan. Atas alasan itulah bapak sosiologi Jerman, Max Weber, pernah menulis: “Ilmu pengetahuan empiris tak dapat mengajarkan seseorang tentang apa yang harus dilakukannya, tetapi hanya apa yang dapat dilakukannya, dan dalam keadaan tertentu, apa yang hendak dilakukannya.” (*eine empirische Wissenschaft vermag niemanden zu lehren, was er soll, sondern nur was er kann und --- unter Umstaenden--- was er will*).⁵ Konteks pernyataan Max Weber adalah suasana tatkala perdebatan ideologis sedang hangat di Jerman. Dalam menegaskan tugas ilmu-ilmu sosial, sosiolog itu hendak menyatakan bahwa ilmu-ilmu sosial mempunyai tujuan lain dari ideologi. Penelitian sosiologi tentang masyarakat adalah mengenai keadaan masyarakat apa adanya, dan bukan masyarakat sebagaimana seharusnya menurut ideologi tertentu. Sosiologi menyajikan *das Sein* masyarakat, sedangkan semua ideologi melukiskan masyarakat sebagaimana diinginkan. Isi ideologi adalah *das Wollen*, sedangkan isi sosiologi adalah *das Sein*.

Namun, hasil penelitian ilmu-ilmu sosial yang dilakukan dengan sikap bebas nilai, kemudian berubah menjadi semacam positivisme dalam ilmu-ilmu sosial. Positivisme itu diterapkan dalam tiga cara.

Pertama, ilmu-ilmu sosial positivis menerapkan metode-metodenya yang diambil-alih begitu saja dari kelompok ilmu-ilmu alam, dan menerapkannya dengan sikap yang sama dengan seorang peneliti gejala alam. Dengan sikap positivis seorang peneliti ilmu sosial meneliti sebuah kelompok sosial dalam masyarakat dengan sikap yang sama dengan seorang peneliti ilmu alam menyelidiki sebuah gunung berapi atau gerak lempeng bumi dalam laut yang menimbulkan gempa bumi. Tentang

5 Max Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Tuebingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1968, hlm. 152.

positivisme dalam ilmu-ilmu sosial sosiolog Peter L. Berger menulis bahwa positivisme hanya:

believes in only those fragments of reality that can be dealt with scientifically. Such positivism results almost invariably in one form or another of intellectual barbarism, as has been demonstrated admirably in the recent history of behavioristic psychology in this country.⁶

Sementara itu kita tahu, bahwa hubungan peneliti alam dengan gunung berapi sangat berbeda dengan hubungan seorang peneliti sosial dengan kebudayaan Jawa atau kebudayaan Lamaholot di Flores Timur yang diselidikinya. Di antara peneliti alam dengan gunung berapi tak ada interaksi. Hubungan hanya berlangsung satu arah dari peneliti yang mengamati dan gunung api yang diamati. Sebaliknya di antara peneliti sosial dengan orang Jawa atau orang Lamaholot yang diselidikinya terdapat interaksi dan saling pengaruh yang berlangsung selama penelitian. Peneliti bisa memberi pengaruh kepada kelompok yang ditelitinya melalui pandangan atau perilakunya, dan sebaliknya peneliti dapat dipengaruhi oleh pergaulannya dengan kelompok yang ditelitinya, yang memperlihatkan banyak kebiasaan yang tidak dikenal peneliti itu dalam kebudayaannya sendiri. August Comte pelopor ilmu-ilmu positivis berkata: "Sifat pertama dari filsafat positivis ialah bahwa semua gejala dipandang tunduk kepada hukum-hukum alam yang tidak berubah."⁷ Max Horkheimer dari aliran Teori Kritis, menyebut teori yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu sosial positivis adalah teori tradisional yang melestarikan status quo (karena hanya memperlihatkan suatu keadaan tanpa mengambil sikap terhadapnya), sedangkan ilmu-ilmu sosial kritis yang menerapkan teori kritis menghasilkan perubahan status quo menjadi keadaan yang lebih menjamin emansipasi dan otonomi tiap orang.⁸

6 Peter L. Berger, *Invitation to sociology: A humanistic perspective* (Penguin Books, 1963), hlm. 144.

7 Dikutip dalam Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 1991, hlm. 36.

8 Esai Horkheimer yang terkenal tentang positivisme dan kritisisme berjudul "Traditionelle und kritische Theorie", terdapat dalam bukunya, Max Horkheimer, *Traditionelle und kritische Theorie: Fuenf Aufsaezte*, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1992. Versi bahasa Inggris esai itu dapat dibaca dalam Max Horkheimer, *Critical Theory: Selected Essays*, dalam bab "Traditional and critical Theory", New York, Continuum, 1972, hlm. 188-243.

Kedua, ilmu-ilmu sosial positivis melakukan reduksi beberapa jenis ilmu sosial kepada satu jenis ilmu sosial saja, yaitu ilmu sosial empiris-analitis. Juergen Habermas menyatakan, ilmu-ilmu sosial itu terbagi sekurang-kurangnya ke dalam tiga jenis utama, yaitu: 1) Kelompok empiris-analitis yang tujuannya adalah mendapatkan informasi melalui observasi atau eksperimen, dan informasi yang diperoleh itu pada gilirannya memungkinkan penguasaan secara teknis. Contoh yang sempurna untuk kelompok ilmu ini ialah ilmu-ilmu alam, dan ilmu-ilmu sosial yang memakai metode ilmu-ilmu alam dengan tujuan yang sama, yaitu ilmu-ilmu sosial positivis. 2) Kelompok kedua ialah ilmu-ilmu sosial hermeneutis, yang tujuannya adalah mengembangkan intersubjektivitas, melalui interpretasi yang memungkinkan *understanding of meaning* atau pemahaman makna. Pemahaman makna ini diperlukan, karena ternyata perilaku yang sama, dalam dua keadaan yang berbeda, dapat mengandung arti yang berlainan atau bahkan bertentangan. Dalam keadaan marah, orang di NTT bisa memaki temannya dengan berkata: "Babi hutan kau". Namun, dua kawan sekolah yang lama tak jumpa, dapat berpelukan ketika bertemu, sambil berteriak, "Hai babi liar selama ini hilang di hutan mana kau!" Makna babi dalam dua konteks itu amat bertentangan. Dalam praktik, ilmu-ilmu humaniora termasuk dalam kelompok ilmu hermeneutis ini. 3) Kelompok ketiga ialah ilmu-ilmu sosial kritis, yang bertujuan menciptakan emansipasi dengan membangunkan orang dari kesadaran yang non-reflektif, melalui refleksi-diri yang dilakukan secara kritis.⁹ Ini terlihat dalam praktik ketika kita menghadapi beberapa gejala dalam masyarakat, tetapi kita tidak menyadari distorsi yang terjadi dalam hubungan sosial yang ada. Kalau guru bertanya kepada anak-anak SD, "Sebelum ke sekolah anak-anak harus minum.....?" Ada yang menjawab minum teh manis, air jeruk, atau coklat. Semua jawaban itu salah, karena dalam buku kunci untuk pilihan ganda (*multiple choice*), jawabannya adalah minum susu. Kalau ini yang terjadi maka latihan itu tidak mendidik kemampuan berpikir menurut akal sehat dan pengalaman, tetapi hanya

9 Juergen Habermas, *Theorie des kommunikativen Handelns*, Jilid I (Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1981), hlm. 45 ff. Hal ini sudah saya uraikan dalam buku saya, Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan* (Jakarta, LP3ES), hlm. 36-37.

mendidik ketaatan kepada kekuasaan dan otoritas. Tugas refleksi adalah mendorong seseorang untuk menyadari keadaan ini sebagai distorsi yang sering tidak disadari, dan kalau distabilkan melalui pembenaran terus-menerus, dapat berubah menjadi kesadaran palsu. Dalam sosologi Marxian, kesadaran palsu adalah fungsi dari ideologi yang dijelaskan sebagai

The existence of a necessary link between ‘inverted’ forms of consciousness and men’s material existence. It is this relationship that the concept of ideology expresses by referring to a distortion of thought which stems from, and conceals social contradictions.¹⁰

Dalam positivisme semua jenis ilmu sosial direduksi kepada jenis pertama saja yaitu jenis empiris-analitis dalam typologi ilmu sosial menurut Habermas.

Ketiga, ilmu-ilmu sosial positivis menyelidiki suatu kenyataan menurut apa adanya tanpa mengambil sikap terhadap keadaan yang ditelitinya. Penelitian tentang banyaknya korupsi yang terjadi, khususnya dalam kalangan birokrasi, tetapi oleh peneliti harus dilihat saja apa adanya, dapat menyebabkan bahwa penelitian seperti itu hanya membiarkan status quo dan secara tak langsung melestarikannya dengan memberinya semacam pembenaran secara positivistic.

Suatu reaksi besar terhadap ilmu-ilmu sosial positivis muncul dalam kelompok Teori Kritis, yang dipelopori Max Horkheimer serta Theodor Adorno dan beberapa tokoh lainnya, dan kemudian diperluas dan diperdalam oleh Juergen Habermas. Patut dicatat bahwa Teori Kritis atau Mazhab Frankfurt (*Frankfurter Schule, Frankfurt School*) bukanlah suatu mazhab yang monolitik, melainkan meliputi banyak paham yang masing-masingnya dipelopori oleh seorang filsuf atau seorang ilmuwan sosial. Namun, pada intinya semuanya bertolak dari hubungan di antara kesadaran manusia dengan proses-proses dalam basis materil kebudayaan, khususnya dalam proses-proses produksi. Asumsi dasar mereka ialah bahwa kesadaran manusia dan realitas materil tidak pernah terpisahkan,

10 Tom Bottomore et al. (eds.), *A Dictionary of Marxist Thought* (Cambridge, Massachusetts, 1983), sub voce “ideology”.

sedangkan dalam pada itu kesadaran manusia tidak selalu mempunyai kekuatan cukup untuk melakukan resistensi kepada kekuatan-kekuatan materil yang potensial mengakibatkan komodifikasi, reifikasi, dan rasionalisasi.¹¹

Menghadapi kondisi itu tugas Teori Kritis ialah menyelidiki proses-proses sejarah yang mendominasi kebebasan manusia, dan menyingkapkan bagaimana ideologi telah membenarkan proses-proses sejarah tersebut. Untuk maksud itu dibutuhkan penelitian interdisipliner yang merupakan kolaborasi berbagai bidang ilmu pengetahuan sosial. Nilai suatu teori sosial, menurut Horkheimer, tidak hanya ditentukan berdasarkan kriteria formal tentang kebenaran, melainkan oleh hubungan teori dengan berbagai tugas, yang dalam suatu momen sejarah yang spesifik, telah diterima oleh kekuatan-kekuatan sosial yang progresif. Perbedaan dalam asumsi mengenai hubungan di antara kesadaran manusia dan pengaruh proses-proses materil, khususnya dalam produksi industri telah menyebabkan perbedaan paham di antara para tokoh Mazhab Frankfurt. Horkheimer dan Adorno memusatkan perhatian terhadap pengaruh proses-proses materil terhadap kesadaran seorang individu. Sedangkan Habermas berpendapat, fokus penelitian harus bergeser dari kesadaran subjektif seseorang kepada proses-proses yang telah memungkinkan manusia menciptakan pemahaman secara intersubjektif dan apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam proses itu untuk mengkoordinasikan berbagai tindakan dan kegiatan mereka.¹²

Hal ini menjadi lebih jelas, karena hasil penelitian ilmu sosial tidak mengharuskan pemerintah misalnya untuk mengambil suatu kebijakan tertentu dalam politik dan ekonomi. Pemerintah tidak didikte oleh hasil penelitian, yang memberi pengetahuan mengenai keadaan tertentu. Sekarang nilai rupiah menjadi semakin lemah terhadap dollar, dan ada desakan dari beberapa pengamat agar pemerintahan Jokowi sebaiknya mengurangi proyek infrastruktur yang menjadi suatu prioritas dalam kebijakan Presiden Jokowi. Kita belum tahu bagaimana sikap pemerintahan

11 Jonathan Turner, *op.cit.*, hlm. 256-257.

12 *Ibid.*, hlm. 258.

Jokowi terhadap usul dan desakan itu. Dalam hal ini patut diingat bahwa keputusan atau kebijakan politik bisa didasarkan pada data penelitian empiris, tetapi dapat juga dibuat bertentangan dengan data penelitian yang ada dan didasarkan pada suatu kemauan politik atau *political will*. Secara teknis dikatakan kebijakan politik dapat dilakukan *on the basis of empirical evidence* tetapi dapat juga *in spite of empirical evidence*.

Sumbangan teori kritis terhadap ilmu-ilmu sosial menjadi lebih nyata dalam pandangan tentang hubungan antara teori dan praktik. Dalam ilmu-ilmu positivis hubungan itu berjalan secara satu arah. Teori menjelaskan kenyataan dan pemahaman tentang teori akan membantu pemahaman tentang apa yang ada dalam kenyataan. Hubungan teori dan praktik berjalan berdasar pada suatu logika unilinear. Teori kritis menekankan hubungan itu secara dialektis. Bukan saja teori menerangkan kenyataan, tetapi kenyataan dapat pula membantu kita memahami teori. Sebuah contoh dalam praktik politik Indonesia yang aktual dapat diceritakan sebagai berikut.

Pada tanggal 4 Juni 2018 Presiden Jokowi mengundang 41 ilmuwan sosial berdialog dengan beliau di Istana Merdeka. Dia meminta pandangan para ilmuwan sosial tentang beberapa soal khususnya mengenai intoleransi dan pentingnya persatuan Indonesia untuk masa depan. Dalam kesempatan itu saya berkata kepada Presiden, “Mengapa presiden-presiden dan para menteri sebelum Presiden Jokowi, sulit sekali diyakinkan untuk membangun lebih banyak jalan raya, lebih banyak pelabuhan dan lebih banyak lapangan terbang di daerah, khususnya di daerah-daerah yang terpencil?” Jawaban mereka untuk menolak usul itu rata-rata didasarkan pada pengandaian bahwa pendapatan di daerah-daerah itu masih rendah dan karena itu tidak bisa dijamin bahwa cukup banyak orang yang akan menggunakan jalan raya yang dibuka, pelabuhan yang dibangun, dan lapangan terbang yang menelan biaya besar.

Ketika Presiden Jokowi berkuasa, dia membangun jalan di daerah, bendungan di Kupang, jalan raya trans-Sumatera, membuka jalan raya baru di Papua, memperbaiki jalan raya yang ada di Kalimantan, dan membuka lapangan terbang yang menelan biaya besar. Dan ternyata

penduduk setempat menggunakan jalan itu untuk membawa hasil pertanian mereka, menggunakan pelabuhan untuk membawa barang dagangan, dan memakai pesawat untuk berhubungan cepat ke kota-kota lain. Perbedaan antara Jokowi dan presiden-presiden serta menteri sebelum dia ialah bahwa alam pikiran pemerintah sebelum dia mengenai pembangunan didasarkan pada *demand-driven economy* artinya harus ada permintaan dan kebutuhan barulah diadakan pembangunan infrastruktur. Jokowi bertindak berdasarkan keyakinan bahwa kalau ada infrastruktur penduduk akan dimudahkan untuk melakukan berbagai kegiatan untuk ekonomi mereka. Ternyata dengan satu gebrakan besar, Jokowi mengubah paradigma ekonomi Indonesia dari *demand-driven economy* ke *demand-creating economy* tanpa debat akademis yang bertele-tele. Ternyata adanya infrastruktur dapat menciptakan permintaan dan kebutuhan dalam ekonomi.

Dalam tanggapannya, Presiden menceritakan, ketika dia memulai proyek infrastruktur dia tidak berpikir tentang ekonomi dan politik. Namun, dia sangat prihatin melihat perbedaan di antara Indonesia bagian Tengah, Barat, dan Timur. Dia sedih melihat di Jakarta orang bisa membeli bensin premium seharga Rp 6.000,-- lebih sedikit, sementara di Papua harga bensin seliter Rp. 60.000,-- dan kalau lagi sulit bisa mencapai Rp 100.000,-- Dia memutuskan harus ada keadilan dengan menetapkan satu harga untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti bensin dan semen untuk seluruh Indonesia. Biaya pengangkutan harus ditekan dengan membangun tol laut yang mempermudah pengangkutan barang-barang kebutuhan pokok. Gagasan itu kemudian berkembang menjadi pembangunan infrastruktur, karena dengan adanya infrastruktur rakyat dapat dipermudah untuk melakukan kegiatan ekonomi mereka tanpa kesulitan dan biaya besar. Dengan kata lain, infrastruktur memungkinkan pemerataan kemakmuran dan keadilan untuk seluruh rakyat.

Di sini terlihat bahwa *empirical evidence* tidak selalu menjadi landasan pengambilan keputusan dan kebijakan politik, tetapi landasannya adalah kemauan politik atau *political will* yang sungguh-sungguh.

ILMU PENGETAHUAN, ILMU-ILMU SOSIAL, DAN TEOLOGI

Ilmu-ilmu alam adalah pengetahuan ilmiah tentang gejala-gejala alam yang diperoleh dan disusun dengan metode-metode ilmu alam. Ilmu-ilmu sosial adalah pengetahuan ilmiah tentang masyarakat manusia yang diperoleh dan disusun dengan metode-metode ilmu sosial. Teologi adalah refleksi tentang iman kepada Tuhan yang disusun berdasarkan metode-metode ilmu teologi. Terlihat dari definisi-definisi itu bahwa apa yang dinamakan ilmu pengetahuan, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harus ada objek penelitiannya, harus ada metode penelitiannya, dan harus ada sistem dalam menyusun pengetahuan yang sudah diperoleh. Kita menyebut ilmu-ilmu alam, dalam bentuk plural, karena ada berbagai bidang ilmu dalam kelompok ini yang masing-masingnya mempunyai metodenya sendiri, baik metode untuk menyoediki alam mati seperti astronomi, fisika dan kimia, maupun alam hidup seperti botani. Ilmu-ilmu sosial juga mempunyai berbagai bidang ilmu seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, linguistik, dan ilmu komunikasi yang masing-masingnya mempunyai metode sendiri. Kegunaan metode ilmiah adalah memberi jalan untuk mendekati objek penelitiannya, dan sekaligus memungkinkan validasi atau pengujian terhadap pengetahuan yang sudah diperoleh.

Dalam ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial tujuan penelitian adalah memperoleh pengetahuan yang objektif, yaitu pengetahuan yang kesahihannya bisa diuji kembali. Pengetahuan yang lolos dalam pengujian disebut pengetahuan yang valid. Istilah pengetahuan yang benar tidak dipakai dalam bidang ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, karena tiap tahap pengetahuan hanya mempunyai status hipotetis, karena penemuan baru dalam penelitian bisa membuat pengetahuan yang diperoleh sebelumnya diperbaiki oleh pengetahuan yang lebih valid dalam pengujian yang lebih ketat.

Filsuf ilmu pengetahuan, Karl R. Popper, mengatakan, sifat hipotetis pengetahuan ilmiah tidak berarti bahwa dalam ilmu pengetahuan tidak ada pengetahuan yang benar, atau tidak ada kebenaran. Kebenaran ilmiah ada, kata filsuf ini, tetapi tidak dapat tercapai oleh manusia. Apa yang dapat dilakukan oleh para ilmuwan adalah mencari berbagai kemungkinan

untuk semakin mendekati kebenaran itu, tanpa dapat mencapainya. Kemampuan ilmu pengetahuan adalah melakukan aproksimasi terhadap kebenaran.¹³ Popper juga menyatakan, objektivitas merupakan suatu ideal yang sukar dirumuskan dan sulit tercapai. Apa yang dalam praktik dapat dilakukan untuk menjamin usaha kepada objektivitas adalah kesadaran dan kesediaan peneliti untuk mengontrol subjektivitas masing-masing orang secara kritis. Orang yang sanggup mengontrol kecenderungan subjektifnya sendiri, lebih mungkin mendekati kebenaran dibandingkan dengan orang yang mencita-citakan objektivitas tetapi tidak bersedia mengawasi kecenderungan subjektivitasnya sendiri.

Teologi adalah suatu bidang ilmu dengan berbagai spesifikasinya yang menyelidiki wahyu yaitu pernyataan diri Tuhan kepada manusia, maupun iman yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dalam mendengar apa yang diwahyukan. Ada sesuatu yang khas dalam ilmu teologi yang membedakannya dari ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Dalam kuliah perpisahannya dari Universitas Tuebingen di Jerman, teolog besar, Hans Kueng; berkata antara lain: Teologi Kristen tidak memproduksi kebenaran, tetapi hidup dari kebenaran Allah, yang akan menjadi hidup, kalau kebenaran itu tiap kali dinyatakan secara baru dalam kejujuran (*Christliche Theologie produziert keine Wahrheit, sondern lebt von Gottes Wahrheit, die aber nur dann lebendig wird, wenn sie je neu in Wahrhaftigkeit gesagt wird*).¹⁴ Hal yang patut dicatat di sini ialah bahwa kebenaran dalam ilmu pengetahuan profan merupakan tujuan atau *terminus ad quem*, yang dicoba didekati terus-menerus dengan berbagai metode, dan hasil pendekatan ini diuji kembali setiap kali dengan metode ilmiah juga. Dalam teologi, kebenaran yaitu kebenaran Allah, sebagaimana dikatakan oleh Hans Kueng, tidak menjadi tujuan berteologi, tetapi justru menjadi titik-tolak, menjadi *terminus a quo* dalam berteologi.

Dengan demikian, tugas teologi ialah menyusun secara sistematis dan metodis pengetahuan kita tentang Allah, yang dalam bentuk idealnya

13 Karl R. Popper, *Objective Knowledge: An evolutionary approach* (Oxford, The Clarendon Press, 1979), hlm. 16-17.

14 Walter Jens & Karl-Josef Kuschel, *Dialog mit Hans Kueng mit der Abschiedsvorlesung von Hans Kueng*, (Muenchen-Zuerich, Piper, 1996), hlm. 105.

akan menjadi teologi sistematis, dan kemudian menerapkan pengetahuan dan pengalaman kita tentang Allah dalam bidang-bidang khusus, tempat pengetahuan itu dihayati secara konkret dalam keterlibatan menghadapi persoalan-persoalan tertentu dalam hidup kita di dunia. Teologi sistematis bermanfaat sebagai pegangan tentang kebenaran-kebenaran pokok mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, yang dalam teologi Katolik dinamakan dogmatik. Dasar-dasar utama untuk teologi sistematis mengenai dogmatik ini adalah Kitab Suci yang berisi Sabda Tuhan, tradisi yang hidup dalam gereja selama berabad-abad dan dipraktikkan oleh umat katolik, serta ajaran yang ditetapkan sebagai kebenaran agama oleh Magisterium Gereja misalnya Konsili Vatikan II yang berlangsung sejak 11 Oktober 1962 hingga 8 Desember 1965.¹⁵

Buku P. Kirchberger *Allah Menggugat* dengan subjudul *Sebuah Dogmatik Kristiani* yang diterbitkan oleh Penerbit Ledalero pada 2007 adalah contoh yang bagus untuk teologi sistematis tentang dogmatik.¹⁶ Buku setebal 793 halaman ini, mempunyai 25 bab, yang terbagi dalam empat bagian besar. Pembagian ke dalam empat bagian ini menunjukkan metode bagaimana ajaran dogmatik disusun secara logis dan sistematis. Bagian I sebagai Pendahuluan menguraikan pengalaman manusia tentang Allah, kemudian bagaimana Allah memperkenalkan diri dalam wahyu, dan manusia mendengarkan Allah dalam iman. Bagian II menguraikan Allah yang kita imani sebagai Allah Tritunggal, dan Allah Tritunggal adalah Allah Persekutuan. Bagian III menguraikan bagaimana Allah Persekutuan ini menciptakan persekutuan di antara manusia, dalam kontras dengan dosa yang menyebabkan pertentangan dan perpecahan. Bab IV menguraikan persekutuan manusia itu dikuduskan oleh Yesus Kristus dalam Gereja dan Gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus mendapat wujudnya sebagai Sakramen Persekutuan. Selanjutnya Gereja sebagai Sakramen Persekutuan diuraikan dalam dua subbagian, masing-masingnya tentang wujud gereja sebagai misteri, dan kemudian wujud gereja sebagai struktur dan tugas-

15 Lihat laporan jurnalistik yang lengkap tentang berlangsungnya Konsili Vatikan II oleh Ralph M. Wiltgen SVD dalam bukunya, *The Rhine flows into the Tiber* (New York City, Hawthorn Books, Inc., 1967).

16 Georg Kirchberger, *Allah Menggugat : Sebuah Dogmatik Kristiani* (Mauwere, Penerbit Ledalero, 2007).

tugas gereja di dalam struktur tersebut.

Perlu dikatakan di sini bahwa teologi sistematis tentang dogmatik ini mengandung banyak sekali tema, yang kemudian oleh teolog-teolog lain dipilih sebagai tema penelitian mereka dan diuraikan secara luas dalam suatu sistematik tersendiri. Buku Hans Kueng tentang gereja berjudul *Die Kirche* adalah suatu teologi sistematis khusus tentang tema gereja, yang diuraikan diuraikan dalam lima bagian besar.¹⁷ Bagian I membicarakan gereja yang riil dalam sejarah serta perubahan citra gereja dalam sejarah gereja dan dalam Perjanjian Baru. Bagian II berbicara tentang Gereja di bawah kekuasaan Allah yang akan datang dalam pewartaan Yesus, dan mendekatnya Kerajaan Allah dalam diri Yesus. Bagian III menguraikan struktur dasar gereja sebagai Umat Allah, sebagai ciptaan Roh, dan sebagai Tubuh Kristus. Bagian IV menguraikan empat dimensi gereja yaitu satu, kudus, katolik dan apostolik. Bagian V dan terakhir menguraikan pelayanan Gereja, dalam imamat umum pada setiap orang dan melalui jabatan-jabatan khusus kegerejaan untuk pelayanan.

Kalau kita mengikuti Bagian Pendahuluan dalam buku *Allah Menggugat* maka teologi sistematik adalah jaminan secara ilmiah tentang apa saja isi wahyu Tuhan kepada manusia dan atas cara apa saja wahyu itu disampaikan. Bagian lain dari Pendahuluan buku ini berbicara tentang iman manusia kepada Tuhan, atau bagaimana manusia mendengarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Studi mengenai bagaimana manusia mendengarkan wahyu Tuhan mengandaikan bahwa kondisi manusia itu harus diperhatikan, kemampuan mendengarnya harus diteliti, dan dalam peristiwa-peristiwa apa saja dia mengalami kehadiran dan pernyataan diri Tuhan atas cara yang sebaik-baiknya.

Dalam pandangan saya, konteks penerimaan wahyu Tuhan oleh manusia itulah yang menjadi titik perhatian dalam apa yang dinamakan teologi kontekstual. Teologi kontekstual adalah jenis teologi yang berupaya menerjemahkan segala teks dalam teologi sistematis menjadi konteks tempat teks itu menjadi konkret dan menjadi pengalaman manusia yang ada di dalamnya. Dia menerjemahkan wahyu menjadi

17 Hans Kueng, *Die Kirche* (Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1967).

sebuah pengalaman yang dimungkinkan dan didukung oleh konteks hidup sekelompok manusia, baik secara budaya, secara ekonomis atau secara politis.

Dalam arti itu ilmu-ilmu sosial dapat memainkan peranan tertentu untuk teologi kontekstual, karena aspek-aspek masyarakat yang diteliti oleh ilmu-ilmu sosial seperti kependudukan, ekonomi penduduk, struktur sosial, sistem politik dan otoritas, sistem sosial-budaya dan nilai-nilai yang mendasarinya dalam suatu kelompok budaya, dapat menjadi unsur-unsur yang membentuk suatu konteks untuk berteologi. Membangun suatu teologi untuk masyarakat yang hidup dari pertanian, akan lain tuntutanannya dari masyarakat yang hidup dari perdagangan atau industri, atau hanya dari menjual jasa. Demikian pun masyarakat yang amat paternalistis, memerlukan suatu teologi yang dapat membuka wawasan tentang pentingnya kesamaan dan kesetaraan gender di antara laki-laki dan perempuan, demi keadilan gender. Ilmu-ilmu sosial juga dapat memberi wawasan berdasarkan hasil penelitiannya bagi para teolog untuk melihat perubahan dalam masyarakat yang harus diberi prioritas. Apakah yang harus diberi prioritas adalah perubahan pada struktur sosial atau perubahan pada manusia orang per orang yang diharap mendorong perubahan pada struktur sosial yang tidak adil. Teolog Amerika Latin Gustavo Gutierrez pernah berkata: “Teologi lama hendak mengubah manusia, agar mengubah dunia; kami hendak mengubah dunia, agar mengubah manusia”.¹⁸

Amerika Latin selalu menjadi contoh karena pemikiran ilmu-ilmu sosial dan teologi di negeri-negeri itu, berkuat pada ide pembebasan, yang dihubungkan dengan perjuangan kelas antara yang kaya dan miskin, antara yang berkuasa dan mereka ada di bawah kekuasaan, antara golongan yang dapat melakukan penindasan opresif dan golongan yang harus menderita akibat-akibat penindasan yang tak terelakkan. Ide mengenai *Umat Basis* dalam gereja memang berasal dari sana sebagai jawaban umat terhadap ancaman umum ketidakadilan dan kekerasan, serta inisiatif orang-orang yang tertindas atau terpinggirkan untuk menggalang bentuk keselamatan

18 Hans Zwiefelhofer, *Christen und Sozialismus in Lateinamerika* (Patmos Verlag, 1974), hlm. 56.

bagi diri mereka melalui solidaritas kelompok kecil, dengan melakukan sharing pengalaman sosial-ekonomi-politik dalam terang iman, berbasis sabda Tuhan dalam Kitab Suci, serta doa bersama dalam kelompok. Pengalaman sosial-politik dan ekonomi mengajarkan mereka bahwa orang-orang yang menderita harus menemukan jalan rohani untuk memperkuat diri menghadapi berbagai ketidak-adilan, dengan membangun solidaritas dan *compassion* di antara mereka yang menghadapi penindasan yang sama. Itulah sebabnya Umat Basis mengandalkan kekuatannya pada persekutuan kecil di antara 10-20 keluarga yang tinggal berdekatan, yang membaca Kitab Suci bersama secara teratur, berdoa bersama, melakukan sharing di antara mereka, dan juga mencari kemungkinan membantu anggota yang mengalami kesulitan yang mendesak.

Seorang teolog Jesuit dari Uruguay, Juan Luis Segundo, menuliskan refleksinya tentang teologi di Amerika Latin sebagai berikut:

Betapa banyak pun alasan-alasan yang subtil, semua itu tak dapat menyembunyikan bahwa satu-satunya ciri metodologis yang relevan dari teologi Amerika Latin, ialah orang tidak bertolak dalam pemikirannya dari suatu daftar sistematis masalah- masalah teologis yang dihubungkan satu sama lain secara logis demi mendapatkan jawaban ortodoks dan terpercaya kepada tiap masalah teologis, melainkan orang mulai dari suatu komitmen untuk berpikir demi kepentingan kaum miskin dan tertindas, dan bertolak dari pertimbangan tentang praksis mereka setiap kali kita melihat bahwa praksis ini dihubungkan oleh teologi dengan mekanisme opresif dari seluruh kebudayaan.”¹⁹

Kutipan tersebut menyatakan dengan cukup eksplisit bahwa di negeri-negeri Amerika Latin para teolog tidak bertolak dari teologi sistematis yang menjaga kebenaran suatu jawaban terhadap masalah teologis, karena terjamin keabsahannya menurut daftar sistematis masalah-masalah teologis, tetapi hendaknya bertolak dari teologi kontekstual dengan melihat praksis umat dan bagaimana praksis ini dihubungkan oleh teologi dengan mekanisme opresif dari dan terhadap seluruh kebudayaan (*every time we perceive that the praxis is linked through theology to the oppressive*

19 Juan Luis Segundo, *Signs of the Times: Theological Reflections*, edit. Alfred T. Hennelly S.J (New York, Orbis Books, 1993), hlm. 70.

mechanism of the whole culture).

Sekalipun demikian, kita belajar dari filsafat hermeneutika bahwa konteks tidak pernah bersifat mutlak dan statis, tetapi bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah. Karena itu setiap konteks selalu dapat *di-dekontekstualisasi-kan* dan *di-rekontekstualisasi-kan* kembali.²⁰ Setelah teologi pembebasan sebagai teologi kontekstual berkembang luas, Magisterium Gereja mengambil sikap terhadapnya. Dalam Ajakan Apostolik atau *Exhortatio Apostolica* pada bulan Desember 1975, yang berjudul *Evangelii Nuntiandi* Paus Paulus VI menyatakan antara lain bahwa Komunitas Umat Basis mempunyai dua kecenderungan dalam perkembangannya. Di satu pihak, Komunitas Basis tetap memelihara persekutuannya dengan Gereja Universal, tetapi di pihak lain, ada kecenderungan padanya untuk menjadi isolasionis karena memandang dirinya sebagai gerakan alternatif yang dapat mengganti kehidupan gereja dalam paroki.

Selanjutnya dalam dokumen kepausan itu dikemukakan beberapa syarat agar Komunitas Basis dapat diterima dalam Gereja Katolik. Syarat-syarat itu ialah: *Pertama*, menjadikan Sabda Allah sebagai sumber hidupnya. *Kedua*, berada dalam kesatuan dengan Gereja Partikular dan Gereja Universal. *Ketiga*, tidak menganggap dirinya sebagai satu-satunya pelaksana evangelisasi. *Keempat*, menunjukkan perkembangan kesadaran, semangat, kerja keras dan terang misioner.

Reaksi terhadap Komunitas Basis dengan model Amerika Latin, terlihat juga dalam gerakan umat di tempat lain. Uskup Agung dioses Mumbai, Mgr. Bosco Penha, menulis bahwa gereja katolik di India tidak akan mengikuti model Komunitas Basis Amerika Latin. Di sana Komunitas Basis tidak hanya dikembangkan di kalangan orang-orang miskin, tetapi juga di kalangan kelas menengah dengan hasil yang baik, sebagaimana terjadi di kota Bombay.²¹

20 Paul Ricoeur, *Hermeneutics and the Human Sciences*, edit. and trans. John B. Thomson (Cambridge-London-New York, Cambridge University Press, 1984), hlm. 91. Lihat juga disertasi Leo Kleden, "Symbolic-Textual Paradigm in the Hermeneutic Philosophy of Paul Ricoeur" (Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 1990), hlm. 166-167.

21 Klaus Kraemer & Klaus Vellquith (eds.), "Preface" dalam *idem, Small Christian Communities: Fresh Stimulus for a Forward-looking Church* (Freiburg, Verlag Herder GmbH, Quezon City, Claretian Publications, 2013), hlm. XI.

Terlihat di sini bahwa Magisterium Gereja hendak mengingatkan, perjuangan iman tidak identik dengan perjuangan kelas, sementara eksperimen India memperlihatkan bahwa Komunitas Basis tidak hanya terbatas pada kelompok miskin dan tertindas tetapi pada golongan yang lebih berada secara ekonomi dan mempunyai status secara sosial politik. Komunitas Basis yang muncul dalam konteks kemiskinan dan ketertindasan di Amerika Latin mengalami dekontekstualisasi menjadi gerakan pembaharuan dalam gereja untuk memperkuat artikulasi iman dan sikap orang katolik dalam konteks mana saja mereka bergerak untuk menggereja sesuai dengan kondisi dan kemungkinan mereka.

Ini artinya ada suatu hubungan timbal-balik yang perlu diperhatikan oleh para teolog dan oleh umat beriman, yaitu saling hubungan di antara teologi sistematik dan teologi kontekstual. Di satu pihak teologi sistematik memberikan suatu pegangan terpercaya tentang wahyu Tuhan dan iman manusia kepadaNya, yang dapat menolong orang untuk menghayati ibadah dan sembah sujud mereka atas cara yang dibenarkan oleh Magisterium Gereja. Di pihak lain teologi kontekstual menerapkan suatu ajaran tertentu (misalnya cinta kasih Kristen dalam bentuk solidaritas dengan kaum miskin dan tertindas), atas cara yang tidak saja efektif secara sosial-politik, tetapi dengan cara yang dapat dibenarkan secara teologis sesuai dengan pernyataan diri Tuhan sendiri dalam wahyu, dan sesuai pula dengan cara manusia mendengarkan pernyataan diri Tuhan dalam iman.

Dalam arti itu, pembelaan terhadap kaum miskin yang berubah menjadi suatu gerakan eksklusif dengan menempatkan umat dalam suatu pertentangan kelas antara orang kaya dan miskin, orang berkuasa dan tertindas, orang tanpa hak dan orang-orang yang dihormati hak-haknya, membuat gereja terjebak dalam pertentangan, sedangkan hakekat gereja adalah persekutuan dalam Yesus Kristus, dan merupakan gereja yang satu, dan bukan dua atau tiga, sebagaimana yang kita akui dalam *credo* sebagai pernyataan iman kita, yang mengatasi segala kecenderungan partisan. Ada distingsi yang subtil di antara sikap menolak dan bahkan benci terhadap dosa dan ketidak-adilan, dan kecenderungan menolak atau

benci terhadap orang berdosa dan kelompok yang tidak adil. Sebaliknya, teologi kontekstual amat bermanfaat dalam melakukan realisasi konkret terhadap ajaran-ajaran dalam teologi sistematik, dengan memberi penekanan khusus dan komitmen yang spesifik kepada suatu isu teologis yang dihidupkan dan diperjuangkan dalam suatu konteks konkret.

PENUTUP

Tinjauan di atas membahas hubungan teologi kontekstual dengan teologi sistematik. Ilmu-ilmu sosial sebagai ilmu pengetahuan empiris hanya berusaha melukiskan kenyataan yang ada dalam masyarakat seperti apa adanya, dan bukan seperti bagaimana kenyataan itu sebaiknya atau seharusnya. Dengan kata lain, kenyataan dilukiskan sebagai *das Sein* dan bukan sebagai *das Sollen*. Ilmu-ilmu sosial tidak dapat memberi saran dan petunjuk normatif tentang kenyataan yang ditelitinya, yaitu apakah realitas yang diteliti itu sesuatu yang baik, kurang baik atau bahkan buruk, dan apa yang harus dilakukan terhadap kenyataan itu. Penilaian normatif atau saran normatif tentang realitas objektif yang diteliti dalam ilmu-ilmu sosial, diberikan dari luar kelompok ilmu ini yaitu oleh filsafat sosial (khususnya filsafat politik) atau oleh teologi sosial dan khususnya teologi politik. Teori Kritis dari Mazhab Frankfurt misalnya, mempunyai keyakinan bahwa ilmu sosial tidak terpisahkan dari filsafat sosial dan harus bekerja dalam terang filsafat sosial.

Pertanyaan mengenai kemiskinan dan tidak meratanya kemakmuran dapat diselidiki oleh ilmu sosial, berupa berapa besar kesenjangan di antara taraf hidup dan pendapatan golongan miskin dan golongan kaya, tetapi pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan terhadap kemiskinan dan kesenjangan kemakmuran, hanya bisa dijawab oleh filsafat sosial atau teologi sosial. Filsafat sosial memberi usulnya berdasarkan pertimbangan akal tentang apa yang harus dilakukan terhadap kenyataan yang dihadapi, sedangkan teologi mengusulkan pertimbangannya berdasarkan akal budi dengan berpegang pada wahyu Tuhan. Di luar agama, pertanyaan semacam itu dijawab oleh ideologi, yang menurut Max Weber merupakan kegiatan intelektual yang berseberangan dengan ilmu-ilmu sosial, karena ilmu sosial meneliti dan mengemukakan kenyataan apa adanya, sedangkan

ideologi mengusulkan suatu dunia yang diinginkan, diharapkan atau dicita-citakan.

Dikatakan secara singkat ilmu-ilmu sosial melukiskan *das Sein* yaitu kenyataan dalam masyarakat seperti apa adanya. Filsafat sosial dan teologi sosial, dengan caranya masing-masing, mengusulkan *das Sollen*, yaitu apa yang harus dilakukan menghadapi kenyataan sosial yang ada, sedangkan ideologi mengusulkan *das Wollen* yaitu suatu masyarakat yang diimpikan, dicita-citakan, dan diharapkan, dan alasan untuk impian semacam itu. Perbedaan antara harapan dalam iman dan harapan dalam ideologi, ialah bahwa dalam iman yang dibimbing oleh agama, harapan didasarkan pada apa yang disampaikan Tuhan dalam wahyu, sedangkan dalam ideologi harapan didasarkan pada analisis kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat dan harus dikerahkan oleh ideologi itu.

Dalam tugas semacam itu teologi kontekstual memegang peranan yang penting. Apakah kemiskinan harus diatasi melalui pendidikan tentang etos kerja tiap orang agar mereka bekerja dengan lebih efisien dan efektif dalam mengumpulkan modal untuk mengatasi kemiskinan sebagaimana diajarkan oleh Etik Protestan dalam studi Max Weber tentang awal pertumbuhan kapitalisme?²² Atau kemiskinan harus diatasi dengan merombak struktur-struktur dalam masyarakat yang mempertahankan kemiskinan pada golongan tertentu agar memberi keleluasaan untuk kemakmuran dan kekayaan pada golongan lain. Teolog Amerika Latin, Gustavo Gutierrez yang sudah dikutip di bagian depan berkata bahwa teologi lama mengajarkan, orang harus mengubah manusia agar mengubah dunia, tetapi teologi pembebasan mengusulkan, orang harus mengubah dunia agar mengubah manusia.

DAFTAR RUJUKAN

Berger, Peter L. *Invitation to sociology: A humanistic perspective*. Penguin Books, 1963.

Bottomore, Tom et al. (eds.). *A Dictionary of Marxist Thought*. Cambridge: Massachusetts, 1983.

22 Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, transl. Talcott Parsons (New York, Charles Scribner's Sons, 1958).

- Kant, Immanuel. *Kritik der reinen Vernunft*. Koeln: Koenemann Verlagsgesellschaft, 1995.
- Horkheimer, Max. *Traditionelle und kritische Theorie: Fuenf Aufsaezte*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1992.
- Habermas, Juergen. *Theorie des kommunikativen Handelns*. Jilid I. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981.
- Jens, Walter and Karl-Josef Kuschel. *Dialog mit Hans Kueng mit der Abschiedsvorlesung von Hans Kueng*. Muenchen-Zuerich: Piper, 1996.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2007.
- Kleden, Ignas. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Kleden, Leo. "Symbolic-Textual Paradigm in the Hermeneutic Philosophy of Paul Ricoeur". Disertasi di Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 1990.
- Kraemer, Klaus and Klaus Vellquith (eds.). "Preface". Dalam *Small Christian Communities: Fresh Stimulus for a Forward-looking Church*. Freiburg, Verlag Herder GmbH, Quezon City: Claretian Publications, 2013.
- Kueng, Hans. *Die Kirche*. Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1967.
- Ricoeur, Paul. *Hermeneutics and the Human Sciences*. Edit. and trans. John B. Thomson. Cambridge-London-New York: Cambridge University Press, 1984.
- Popper, Karl R. *Objective Knowledge: An evolutionary approach*. Oxford: The Clarendon Press, 1979.
- Sugendo, Juan Luis. *Signs of the Times: Theological Reflections*, edit. Alfred T. Hennelly. New York: Orbis Books, 1993.
- Turner, Jonathan H. *The Structure of Sociological Theory*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1991.
- Wiltgen, Ralph M. *The Rhine flows into the Tiber*. New York City: Hawthorn Books, Inc., 1967.
- Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Transl. Talcott Parsons. New York: Charles Scribner's Sons, 1958.
- _____. *Gesammelte Aufsaezte zur Wissenschaftslehre*. Tuebingen J.C.B, Mohr (Paul Siebeck), 1968.
- Zwiefelhofer, Hans. *Christen und Sozialismus in Lateinamerika*. Patmos Verlag, 1974.